



ANALISA

14 Januari 2025

Vol. 0007

Hasil Kajian Cepat Terhadap Isu Strategis Kekinian

The Reform Initiatives

Merupakan lembaga riset kebijakan yang bernaung di bawah PT Semesta Infomedia Indonesia, berkedudukan di Jakarta.

TRI fokus pada penelitian kebijakan terkait Ekonomi, Fiskal, Kesejahteraan Sosial, Desentralisasi, Lingkungan Hidup & Perubahan Iklim, Tata Kelola Kebijakan yang Baik, Politik & Elektoral, Penegakan Hukum, Ekonomi Digital, serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).



Ilustrasi Gemini AI



Hadi Prayitno

Direktur Eksekutif
The Reform Initiative
(TRI)

Robohnya Sumatera Kita

Persinggungan saya dengan para pejuang keadilan dan kelestarian lingkungan hidup dimulai sejak akhir 2011, mengaitkan kerja advokasi anggaran dengan perbaikan tata kelola hutan dan lahan. Mempromosikan kesadaran untuk memperjuangkan tata kelola kebijakan pusat dan daerah yang lebih responsif terhadap perlindungan lingkungan hidup sebagai salah satu urusan wajib untuk ditunaikan. Regulasi, perencanaan pembangunan dan penganggaran harus dipengaruhi dengan telaten agar tidak berpeggungan dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009.

Petulangan jilid kedua terjadi ketika mendampingi organisasi lingkungan hidup di Sumatera untuk mengadvokasi kebijakan anggaran untuk perlindungan lingkungan hidup. Simpul kampanye program kewaspadaan masyarakat terhadap REDD+ periode 2010-2015 yang didukung oleh Samdhana Institute tersebut melahirkan satu buku berjudul: "Robohnja Sumatera Kami: tutur lirih warga krisis kehidupan di sekitar Pulau Sumatera". Sebuah bunga rampai keresahan tujuh aktivis lingkungan dari Lampung, Bengkulu, Riau, Sumatera Barat, dan Aceh ketika itu.

Tulisan ini dipersembahkan untuk mengenang dan menghargai kersehan para pejuang lingkungan yang semakin relevan dengan kejadian bencana akhir-akhir ini di Sumatera.

Kerentanan Sumatera

Sumatera dikepung konsesi, meliputi perkebunan sawit, tambang hingga hutan tanaman industri. Buku tersebut mencatat, masyarakat lokal terperangkap ekonomi politik perijinan, aneka bencana alam, kebakaran hutan dan lahan, lenyapnya keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan dan obat-obatan, termasuk maraknya konflik agraria yang berujung pengusiran kelompok marginal.

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) merilis angka deforestasi netto di Sumatera periode 2013-2022 mencapai total 1,43 juta hektar. Menteri Kehutanan merilis data laju deforestasi pada tiga provinsi dilanda bencana. Periode 2022-2025 tercatat total deforestasi Aceh 18.020 hektar, Sumatera Utara 19.740 hektar, dan Sumatera Barat 16.862 hektar (4/12).

Bagi warga Sumatera, dua musim beriringan dengan dua bencana: kemarau terancam kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), penghujan diintai bencana banjir dan tanah longsor. Karhutla 2015 adalah bencana musim kering paling besar sepanjang Sejarah di Indonesia, terjadi di 17 Provinsi dan menimbulkan kerugian multidimensi kurang lebih Rp221 triliun (Bank Dunia, 2015). Sembilan dari sepuluh provinsi di Sumatera dilanda Karhutla dengan luas areal terbakar mencapai 468.868 hektar Lahan Gambut dan 572.149 hektar lahan mineral, setara 40 persen dari total areal terbakar secara nasional (Trinirmalaningrum dkk., 2015).

Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda 52 kabupaten di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh meninggalkan jejak luka dan duka, yang tidak akan mudah pulih dalam jangka panjang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan 1006 meninggal dunia, 217 jiwa belum ditemukan, dan 5 ribu lainnya mengalami luka-luka. Daya rusak bencana telah menghancurkan lebih dari 158 ribu rumah, 1.200 fasilitas umum, 219 fasilitas kesehatan, 581 fasilitas pendidikan, 434 rumah ibadah, 290 gedung/kantor, dan 145 jembatan (Minggu, 14 Desember 2025).

BNPB juga mencatat jumlah bencana di Sumatera sejak 1 Januari hingga 10 Desember 2025 mencapai 968 kejadian. Sebagian besar bencana meliputi banjir 412 kejadian, Karhutla 400 kejadian, dan cuaca ekstrem 17 kejadian.

Tekanan konsesi juga memicu konflik agraria. Sekretariat Nasional Konsorsium Pembangunan Agraria (KPA) mencatat, sepanjang tahun 2024 terjadi 295 konflik agraria tersebar pada 34 provinsi di seluruh Indonesia. Letusan konflik agraria di Sumatera mencapai 76 peristiwa, sebagian besar terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Jambi.

Lekas Berbenah

Saat ini pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait, kelompok masyarakat sipil dan relawan sedang bekerja ekstra keras melakukan penanganan dampak langsung bencana, juga bersiap melakukan pemulihan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Daftar pekerjaan yang harus dikerjakan secara bersama-sama meliputi penanganan korban jiwa, perawatan korban luka, penyediaan kebutuhan pokok, normalisasi jaringan listrik, dan pembangunan kembali infrastruktur yang rusak di berbagai area.

Publik tanah air tentu berharap, bencana serupa jangan pernah terulang kembali. Ketidakseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah hulu masalah yang harus diselesaikan dengan serius. Pemerintah pada seluruh tingkatan sepatutnya memperkuat komitmen perbaikan tata kelola terkait pemanfaatan sumber daya alam secara menyeluruh, dari hulu sampai hilir.

Regulasi yang sudah mengadopsi prinsip-prinsip mulia harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Kegiatan usaha berbasis sumber daya alam harus dievaluasi total, mulai dari perizinan sampai kepatuhan pelaksanaan di lapangan. Pelaku usaha yang tidak patuh harus ditindak tegas tanpa pandang bulu.

Perencanaan ruang sebagai instrumen pencegahan dan perlindungan lingkungan hidup harus ditinjau kembali sesuai dengan peruntukan asalnya. Perubahan fungsi kawasan hutan harus ditata ulang dipulihkan.

Pokok pemikiran Richard Routley (1973), John Passmore (1974), Holmes Rolston III (1986, 2012, 2020) tentang etika lingkungan sepatutnya menjadi panduan dalam merancang kebijakan dan menyusun regulasi terkait pemanfaatan sumber daya alam di Sumatera. Teori utama antroposentrisme, biosentrisme dan ekosentrisme merupakan prinsip dasar yang selalu relevan dirujuk, bukan hanya oleh pengambil kebijakan, melainkan juga pelaku usaha dan kelompok masyarakat sipil sebagai polisi integritas.

Mari kembalikan dan pulihkan Sumatera sebagai salah satu pilar penting “surau” Indonesia. Kekayaan zona ekologis, kawasan hutan, dan keanekaragaman hayati di dalamnya adalah aset utama untuk dijaga bersama.